

Pelayanan Publik Berbasis Inovasi (*E-Government*) melalui Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SIPITER) dalam Menghadapi Revolusi Society 5.0 di Kabupaten Cirebon

Rakhmat Hardiyansyah

Politeknik Bina Persada Cirebon

e-mail: rakhmat.hardi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengeksplorasi bagaimanakah pelayanan publik berwujud inovasi *E-Government*, khususnya lewat Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SIPITER), bisa menyambut tantangan revolusi Society 5.0 di Kabupaten Cirebon. Metode yang dipakai yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi ini dilangsungkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan seluruh informan merupakan pegawai dari dinas tersebut. Studi ini menyarankan beberapa langkah teruntuk pemerintah pada penerapan inovasi pelayanan publik berwujud *e-government* lewat SIPITER di Kabupaten Cirebon, ditengah lain: memakai SDM aparatur pada pengelolaan *E-Government*, memberikan tugas yang jelas kepada pegawai guna pengelolaan dana *E-Government*, juga memakai kekuatan Kabupaten Cirebon yang menyimpan SDM kompeten sesuai bidangnya guna meningkatkan pengetahuan mengenai *Smart Governance*. Selain itu, terdapat 82 aplikasi layanan publik dan 56 layanan pemerintahan yang mendukung inisiatif *Smart City* di Kabupaten Cirebon, dengan adanya *Command Center* selaku pusat kendali teknologi informasi yang juga berpotensi menjadi destinasi wisata edukasi.

Kata kunci: *Pelayanan Publik, Implementasi, E-Government, Society 5.0*

PENDAHULUAN

Di era digital kini, rancangan society 5.0 sudah muncul selaku kelanjutan atas revolusi industri 4.0. Pada rancangan industri 4.0, individu dipandang selaku sumber inovasi yang tidak terpisahkan atas teknologi. Kehadiran rancangan ini semakin mempermudah penyelesaian masalah yang dihadapi individu di lingkungan perkotaan, satu atas banyaknya lewat penerapan *smart city* (Putra Ardinata et al., 2022). Sementara itu, revolusi industri 5.0 ataupun society 5.0 melibatkan otomatisasi seluruh proses pada beragam aktivitas. Kemajuan teknologi internet tidak hanya memperluas konektivitas ditengah individu di seluruh dunia, tapi juga menjadikan rancangan society 5.0 selaku dasar guna proses transaksi online ditengah pemerintah juga masyarakat (Heri et al., 2021).

Oleh sebab itu, pemerintah wajib cerdas pada menyambut era globalisasi juga revolusi 5.0. Secara tidak langsung, hal ini membuktikan bahwasanya revolusi digital juga tantangan globalisasi yakni sesuatu yang tidak bisa dihindari, juga memerlukan prinsip transparansi juga akuntabilitas (Sahrir, 2022). Pada perwujudan pendekatan, terdapat peluang juga tantangan pada memakai data atas beragam aspek yang terintegrasi, sehingga memungkinkan penduduk guna mengakses layanan dengan lebih baik. (Budi & Priska Lestari, 2022).

E-government memakai teknologi guna memperbaiki akses distribusi layanan atas pemerintah pusat juga daerah, membagikan kegunaan teruntuk warga negara, mitra bisnis, juga pegawai. Pemerintah daerah memakai aplikasi digital (*E-Government*) guna menyesuaikan

susunan organisasi juga proses yang mendasari distribusi layanan publik (Pittaway & Montazemi, 2020).

Pelayanan publik mencakup semua aktivitas yang dilangsungkan pemerintah guna sejumlah orang pada sebuah kelompok ataupun komunitas, dengan tujuan membagikan kegunaan juga kepuasan, meskipun hasilnya tidak berupa produk fisik (Sinambela, 2010). Beberapa faktor krusial pada keberhasilan implementasi e-government meliputi ketersediaan SDM, kelembagaan, infrastruktur, juga regulasi yang menyeluruh. Satu atas banyak peraturan atas Pemerintah Pusat yang mengelola hal ini yakni (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga sudah mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengelola perihal e-government, yakni (Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 perihal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon). Seluruh pelayanan publik juga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cirebon sudah berwujud internet dengan memakai e-government. E-Government Kabupaten Cirebon bisa diakses lewat situs web <https://cirebonkab.go.id/>, peluncuran aplikasi mobile Cirebon katon pada penataan layanan publik seperti pengurusan izin usaha, pembayaran pajak juga informasi pariwisata, juga aplikasi Sistem Kependudukan Informasi juga Layanan (SIPENDIL), Call Center 112 guna keluhan juga layanan informasi teruntuk masyarakat, juga peningkatan Sistem Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) guna menampung aspirasi juga keluhan masyarakat (Priyono et al., 2022).

Satu atas banyak inovasi yang sudah diterapkan yakni perubahan manajemen tata kelola pelayanan teruntuk masyarakat yang berdasar teknologi. Pergeseran pada pelayanan publik juga mencerminkan awal penerapan era Big Data ataupun era Teknologi Data (Intan Purnama Sari et al., 2022). Upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon menerapkan rancangan *e-government* pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon diantaranya:

1. 73 Perangkat daerah yang terakses internet di Kabupaten Cirebon.
2. 33 Perangkat daerah yang mendukung layanan publik dan administrasi umum.
3. 551 Menara BTS.
4. 82 Aplikasi Layanan Publik.
5. 56 Aplikasi Layanan Pemerintahan.

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon 2023

Hasil studi membuktikan bahwasanya layanan pemerintah yang memakai *e-government* bisa membantu mendekatkan masyarakat memakai perangkat teknologi tanpa membatasi jarak juga waktu. Jikalau informasi *e-government* lengkap juga mudah diakses, itu akan meningkatkan tata kelola pemerintahan juga meningkatkan akuntabilitas di lembaga pemerintah. *E-government* bercita-cita guna meningkatkan produktivitas juga efisiensi birokrasi. Kreativitas juga terobosan juga diharapkan meningkat, yang akan menguntungkan masyarakat juga penyedia layanan publik. Jikalau e-government dipakai pada praktik penyelenggaraan pelayanan publik, itu bisa meningkatkan kenyamanan juga efisiensi; guna mencapai hal ini, jaringan kerja tiap lembaga wajib dioptimalkan. Jikalau layanan konvensional tidak beralih secara terpadu ke layanan berdasar elektronik, ini akan berdampak negatif pada Masyarakat (Rahmadany, 2021).

Tapi, masih ada beberapa masalah yang dihadapi. Penataan *E-Government* pada era society 5.0 masih menyambut kelemahan pada hal pengawasan. Selain itu, fasilitas yang ada belum memadai guna implementasi *E-Government*. Pola relasi antarunit kerja juga norma-norma yang berlaku juga wajib ditingkatkan pada pelaksanaannya. Meskipun pendekatan *E-Government* guna

merealisasikan *Smart Governance* sudah diterapkan, pencapaian keberhasilan masih belum mencakup semua aspeknya (B. Nugraha, 2020). Selain itu, implementasi pendekatan ini belum sepenuhnya efektif sebab banyak warga yang belum memahami pendekatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan SDM, anggaran, transparansi, juga konsistensi tiap organisasi, juga kurangnya pemahaman juga respons aparat, keseriusan pada perwujudan pendekatan, juga kekurangan pada sumber daya ekonomi juga kekuasaan (Ramadhani S, 2023).

E-government yakni proses sistem pemerintahan yang memakai teknologi informasi juga komunikasi (TIK) guna mempermudah komunikasi juga transaksi ditengah warga, organisasi bisnis, lembaga pemerintah, juga stafnya. Tujuannya yakni guna mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, juga akuntabilitas pemerintah atas warganya. Rancangan ini mencakup relasi ditengah Pemerintah ke Pemerintah (G2G), Pemerintah ke Bisnis (G2B), juga Pemerintah ke Warga (G2C) (J. T. Nugraha, 2022).

Kabupaten Cirebon, seperti daerah lain di Indonesia, tengah bertransformasi menuju era Society 5.0, di mana teknologi informasi juga komunikasi menjadi elemen kunci pada beragam aspek kehidupan. Hal ini membawa peluang besar teruntuk inovasi pelayanan publik berdasar e-government guna meningkatkan kualitas juga efisiensi layanan teruntuk masyarakat. Tapi, di sisi lain, terdapat pula beragam fenomena permasalahan yang dihadapi pada implementasi e-government di Kabupaten Cirebon, di antaranya:

Ketersediaan jaringan internet yang belum merata, khususnya di daerah pedesaan, menjadi kendala teruntuk masyarakat pada mengakses layanan e-government. Selain itu, kapasitas SDM (SDM) yang belum optimal, kurangnya koordinasi juga sinergi tiap pemangku kepentingan, keterbatasan literasi digital juga kemampuan masyarakat pada memakai teknologi informasi juga komunikasi, juga budaya birokrasi yang masih kaku juga tradisional menyulitkan adaptasi atas pola kerja berdasar digital.

Perilaku birokrasi memainkan peran penting pada pengingkatan Kabupaten Cirebon menuju status Smart City. Selama perwujudan program Society 5.0, tujuan ini yakni menciptakan kota yang layak huni, efisien guna masyarakat, dengan pelayanan publik yang baik, perekonomian yang kuat, juga infrastruktur yang teratur juga rapi. Pemerintah Kabupaten Cirebon berusaha merealisasikan hal tersebut dengan membangun "Orang Pintar" selaku pendukung Komunitas 5.0. Tapi, menciptakan "Orang Pintar" tidaklah mudah. Bupati Cirebon wajib terlebih dahulu membangun Pemerintah Pintar, sebab pemerintah berperan selaku pelaksana utama Komunitas 5.0.

Berlandaskan fenomena yang sudah dijelaskan, penting guna melangsungkan studi guna mengevaluasi sejauh mana kesiapan pelayanan publik berdasar inovasi (E-Government) lewat Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon. Peneliti memilih Kabupaten Cirebon ataupun Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon selaku lokasi studi sebab Kabupaten Cirebon yakni satu atas banyak kabupaten yang sudah menerapkan rancangan *Smart City*.

METODE

Studi ini bertujuan guna mengeksplorasi inovasi pada Pelayanan Publik *Berbasis E-Government* lewat Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon. Metode yang dipakai yakni deskriptif kualitatif, memakai teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara, juga dokumentasi.

Studi kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, mengkaji objek pada kondisi alaminya (berbeda dengan pendekatan eksperimen). Studi ini memakai metode kualitatif selaku alat utama, memakai teknik pengumpulan data yang dilangsungkan secara triangulasi (menggabungkan beragam metode), juga analisis data dilangsungkan secara induktif ataupun kualitatif. Hasil atas studi kualitatif menekankan pada pentingnya generalisasi (Sugiyono, 2018)

Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, juga penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan proses penyaringan juga pemfokusan pada data "mentah." Penyajian data merupakan subproses atas "penyajian" yang mencakup pengorganisasian informasi. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti mulai melangsungkan interpretasi, yakni membagikan makna pada data ataupun informasi yang sudah disajikan (Nugroho, 2020).

Studi ini dilangsungkan di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon, dengan keseluruhan informan berasal atas pegawai Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon. Informan yang terlibat pada studi ini yakni:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon (1 Orang).
2. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government* (1 Orang).
3. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian (1 Orang).
4. Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Cirebon (3 Orang).
5. Camat Mundu dan Camat Palimanan (2 Orang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi membuktikan bahwasanya ada tiga pendekatan yang bisa diterapkan guna mempersiapkan ASN pada memakai teknologi guna mendukung peningkatan berkelanjutan di Era Society 5.0. Pendekatan tersebut meliputi: 1) Pemerintah wajib menyusun kebutuhan juga rencana peningkatan kecakapan ASN pada jangka waktu satu tahun, yang mencakup inventarisasi kecakapan teknis lewat dialog ditengah pimpinan juga staf. 2) Melangsungkan peningkatan kecakapan teknis pegawai lewat program pelatihan. 3) Melangsungkan evaluasi guna menilai kesesuaian perencanaan juga perwujudan peningkatan kecakapan ASN, juga mengukur kegunaan program atas kenaikan kecakapan, kapasitas pejabat fungsional, juga kapasitas instansi (Kusuma, 2022).

Hasil studi membuktikan bahwasanya Pendekatan juga Strategi Nasional Peningkatan *E-Government* sudah mulai diimplementasikan di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon sudah mengembangkan *e-government* dengan menyusun website selaku media utama guna pelayanan informasi publik. Tapi, wajib dilangsungkan studi lebih lanjut mengenai aspek-aspek lain yang mendukung Society 5.0 agar Kabupaten Cirebon bisa dikategorikan selaku kabupaten dengan rancangan Society 5.0 (Chairunisa et al., 2024).

Guna mengevaluasi efektivitas penerapan pendekatan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi masyarakat 5.0 di Kabupaten Cirebon, peneliti melangsungkan wawancara, observasi, juga dokumentasi. Studi ini dilangsungkan di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon. Teori yang diuraikan oleh G. Shabbir Cheema juga Dennis A. Rondinelli pada Subarso menyatakan bahwasanya implementasi pendekatan dipengaruhi oleh empat faktor: kondisi lingkungan, relasi organisasi, sumber daya, juga agen penerima program. Keempat faktor ini saling terkait satu sama lain (Subarsono, 2012).

Kondisi Lingkungan

Keberhasilan sebuah pendekatan didukung oleh kondisi lingkungan yang ada di pada

instansi ataupun organisasi. Kondisi ini mencakup ketersediaan sarana juga prasarana yang mendukung pelayanan. Di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon, keadaan lingkungan sudah amat baik. Hal ini terbukti atas pendapat informan yang menyatakan bahwasanya terdapat operator juga fasilitas jaringan internet di setiap unit kerja perangkat daerah, yang berperan pada penataan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER).

Pada kenaikan pelayanan lewat Sistem Informasi pelayanan Terpadu (SIPITER), Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan juga Catatan Sipil juga Dinas Pendapatan Daerah sudah berjalan juga bisa diikuti oleh para para aparatur satuan kapasitas perangkat daerah juga para satuan kapasitas perangkat daerah, tapi bilamana ada kekurangan wajib ditingkatkan lagi pada pemakaian pelayanan lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) yakni dengan mengadakan pelatihan juga penambahan menu layanan publik pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon.

Relasi tiap Organisasi

Atas hasil wawancara dengan informan, bisa disimpulkan bahwasanya dimensi relasi tiap organisasi pada implementasi pendekatan *e-government* dianggap selaku pendekatan juga strategi yang baik guna penyelenggaraan pemerintahan, juga guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cepat, efektif, juga efisien. Pendekatan juga strategi ini diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan guna memperkuat penerapan *e-government* di Indonesia, juga diatur pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon juga sudah melangsungkan Komitmen bersama pada merealisasikan Gerakan *Smart City* selaku upaya penampung komunikasi dengan satuan kapasitas perangkat daerah maka dibentuk pokja peningkatan *smart city* pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon sudah berjalan sesuai ketentuan.

Penguatan *Smart City* yang dilangsungkan oleh Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon mencakup peningkatan jaringan yang menghubungkan seluruh unit kerja perangkat daerah, kecamatan, juga kelurahan, juga penyediaan gedung data center yang berfungsi selaku tempat penyimpanan server aplikasi yang sudah dibangun oleh pemerintah. Ini diharapkan bisa mempermudah proses integrasi seluruh aplikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Meskipun sudah ada pola kerja sama terkait penataan *e-government* pada menyambut revolusi society 5.0, perwujudan masih membuktikan kelemahan pada hal pengawasan. Guna mengatasi masalah ini, Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon meningkatkan komunikasi juga kerja sama guna mengelola *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) dengan lebih baik.

Sumber Daya

Berlandaskan hasil wawancara dengan informan, bisa disimpulkan bahwasanya pada dimensi sumber daya guna penataan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi society 5.0 di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon sudah memahami penataan dana dekonsentrasi. Meskipun sarana juga prasarana sudah ada, dukungannya belum maksimal guna penataan dana tersebut. Selain itu, meskipun sanksi yang berlaku sudah diterapkan, masih diperlukan kenaikan kesadaran aparatur atas tanggung jawab kerja mereka. Dengan demikian, diharapkan bahwasanya faktor SDM juga non-individu bisa meningkatkan pelayanan publik lewat SIPITER secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan juga mendorong tercapainya

smart city yang berkelanjutan.

Karakteristik juga Kemampuan Agen Pelaksana

Bisa disimpulkan bahwasanya karakteristik juga kemampuan agen pelaksana pada implementasi pendekatan, khususnya pada penataan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) di Kabupaten Cirebon, sudah cukup baik juga memadai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang wajib diperbaiki guna meningkatkan perwujudan pendekatan anggaran *e-government*. Pola relasi tiap unit kerja juga pengawasan wajib diperbaiki agar tanggung jawab juga tugas bisa dilangsungkan dengan lebih baik. Dengan demikian, penataan *e-government* lewat SIPITER pada menyambut revolusi society 5.0 bisa berjalan secara efektif juga efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga menghindari masalah seperti korupsi.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil studi yang sudah dilangsungkan, peneliti menyimpulkan bahwasanya implementasi pendekatan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi society 5.0 di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut bisa dilihat atas temuan yang didapat peneliti lewat observasi juga wawancara, ditengah lain:

Pertama, kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon sudah memadai, seperti yang diungkapkan oleh informan mengenai kondisi sosial juga budaya juga penerima program pada penataan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon.

Kedua, meskipun penataan *e-government* pada menyambut revolusi society 5.0 sudah ada, masih ada kelemahan pada pengawasan selama pelaksanaannya. Pola penataan *e-government* lewat SIPITER belum merata, terdapat perbedaan ditengah instansi yang satu dengan yang lainnya.

Ketiga, berlandaskan wawancara dengan responden, dimensi sumber daya guna penataan *e-government* lewat SIPITER di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon belum optimal.

Keempat, karakteristik juga kemampuan agen pelaksana pada implementasi pendekatan *e-government* lewat SIPITER di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon sudah cukup baik, tapi pola relasi tiap unit kerja juga norma-norma yang berlaku wajib ditingkatkan pada pelaksanaannya.

SARAN

Adapun saran yang penuli ajukan pada studi sebagai berikut:

Memakai SDM aparatur pada penataan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) yakni penting, termasuk membagikan tugas yang jelas teruntuk pegawai guna mengelola dana *e-government*. Kabupaten Cirebon menyimpan kekuatan berupa SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing, yang bisa meningkatkan pengetahuan perihal *Smart Governance*. Dengan 82 aplikasi layanan publik juga 56 layanan pemerintahan, Kabupaten Cirebon mendukung rancangan *Smart City* lewat adanya *Command Center* selaku pusat pengendali teknologi informasi, yang juga bisa berfungsi selaku tempat wisata edukasi. Selain itu, hal ini bisa menjadi inspirasi teruntuk daerah lain yang ingin mengadopsi *smart governance*. Pemerintah daerah mampu mengelola data juga informasi dengan cepat, yang berkontribusi pada

perkembangan positif pada membangun Kabupaten Cirebon menjadi *Smart City* pada pelayanan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih teruntuk beasiswa, penyandang dana, enumerator dll.

REFERENSI

- Budi, B. N., & Priska Lestari, R. (2022). Keadaan Big Data bisa menjadi Peluang juga Tantangan Teruntuk Good Governance di Kemajuan Sosial. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, 5(01), 10–17. <https://doi.org/10.51192/almubin.v5i01.245>
- Chairunisa, M., Prima, Y., & Priyatna, C. (2024). Evaluasi Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10700698>
- Heri, O., Sandika, F., Apriliani, F., Ramadhan, G., & Adilah, H. (2021). *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari Revolusi Industri 5.0 Pada Perspektif Ekologi Administrasi Desa* (Vol. 2, Issue 1).
- Intan Purnama Sari, M., Haris Saputra, M., & Ihsan Mattalitti, M. (2022). *Transformasi Pelayanan Publik Menuju Era Data Technology di Masa New Normal*.
- K, K. F. (2022). *Kesiapan Juga Tantangan Aparatur Sipil Negara Pada Menyambut Perkembangan Teknologi Guna Mempercepat Peningkatan Berkelanjutan Di Era Revolusi Digital Society 5.0*.
- Nugraha, B. (2020). Implementation of E-Government Policy in Making Smart Governance at Government Communication and Informatics Department, Bandung. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Juga Konsultan Sosial*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v2i1.46>
- Nugraha, J. T. (2022). *E-government juga Pelayanan Publik (Studi perihal Elemen Sukses Peningkatan E-government di Pemerintahan Kabupaten Sleman)*.
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Cirebon*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. (n.d.).
- Pittaway, J. J., & Montazemi, A. R. (2020). Know-how to lead digital transformation: The case of local governments. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101474. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101474>
- Priyono, T., Kabupaten, A., Provinsi, C., & Barat, J. (2022). *Evaluasi Pendekatan Program Smart City Oleh Dinas Komunikasi Juga Informatika Di Kabupaten Cirebon*.
- Putra Ardinata, R., Rahmat, H. K., Andres, F. S., Waryono, W., Studi, P., Perhotelan, M., Pariwisata, F., & Perhotelan, D. (2022). Kepemimpinan Transformasional Selaku Solusi Peningkatan Rancangan Smart City Menuju Era Society 5.0: Sebuah Kajian Literatur Transformational Leadership As A Solution For The Development Of The Smart City Concept In The Society Era: A Literature Review. In *Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research* (Vol. 1, Issue 1).
- Rahmadany, A. F. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-government pada*

menyambut Pandemi Covid-19 di Indonesia.

<https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2042>

Ramadhani Shofy Nurul, M. A. (2023). *Implementasi Inovasi E-Government Pada Pelayanan Publik Studi Kasus Aplikasi Sampah Online Banyumas (Salinmas)*.

Sahrir, R. (2022). *Strategi Pemerintah Pada Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menyambut Tantangan Industri 5.0*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/h6gfn>

Sbm, N. (2020). *Beberapa Masalah Pada Peningkatan Sektor Pariwisata Di Indonesia*. 7(2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>

Sinambela, L. P. (2010). *Reformasi pelayanan publik: teori, pendekatan, juga implementasi*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=aKKJAAAAMAAJ>

Subarsono, A. (2012). *Analisis Pendekatan Publik (Rancangan, Teori, juga Aplikasi)*.

Sugiyono, D. (2018). *Metode studi kuantitatif, kualitatif juga R & D/Sugiyono*. Bandung: Alfabeta, 15(2010).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik. (n.d.).